

# **PERLUASAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

**Margareth Wilhelmina Pau**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

E-mail: margarethwilhelmina@upnvj.ac.id

## **Abstrak**

Tindak pidana pencemaran nama baik kian marak terjadi, terutama di media sosial. Namun, hukum positif yang mengatur mengenai pencemaran nama baik kerap kali dianggap sebagai “pasal karet” karena ketidakjelasan ketentuan tentang hal-hal yang dapat dijerat dengan pasal tersebut. Selain itu, hukum formil di Indonesia, yaitu KUHAP belum mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan jenis data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik harus memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik dan kekuatan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diatur dalam UU ITE yang bersifat *lex generalis*. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai kejelasan ketentuan dalam pasal pencemaran nama baik.

**Kata Kunci:** Perluasan, Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Pidana Indonesia.

# ***THE EXPANSION OF ELECTRONIC EVIDENCE IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW***

**Margareth Wilhelmina Pau**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

E-mail: margarethwilhelmina@upnvj.ac.id

## ***Abstract***

*Defamation is increasingly common, especially on social media. However, positive laws about defamation often considered as "rubber articles" due to unclear provisions regarding matters that can be charged with this article. In addition, as a formal law in Indonesia, KUHAP does not yet regulate electronic evidence as a legal evidence. To answer this problem, the research method used is normative juridical using the statutory approach and the type of secondary data obtained by means of literature study. The results of the study indicate that matters that can be charged with a defamation article must fulfill the elements of defamation and the strength of electronic evidence as legal evidence that has been regulated in the ITE Law which is lex generalis. So it is necessary to conduct socialization for law enforcement officers and the public regarding the provisions clarity of the article on defamation.*

**Keywords:** *Expansion, Electronic Evidence, Indonesian Criminal Procedure Law.*